

ADA NAMA MENTERI LHK DALAM OBROLAN SYL DAN PIMPINAN KPK

Firli Bahuri, Alexander Marwata hingga Nurul Ghufron Disebut Eks Sekjen Kementan

Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar muncul sidang kasus pemerasan di Kementan, Rabu (19/6/2024). Meski tak terkait dengan pokok perkara, tapi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata sempat meminta nomor Menteri Siti Nurbaya saat mengobrol lewat chatting dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL pada 2022. Hal tersebut diungkap oleh mantan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyo. Selain itu, dia juga mengungkap adanya pemberian Rp 800 juta kepada mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Yang dia ketahui, saat itu ada permasalahan terkait pengadaan sapi di Kementan dan sedang dilidiki oleh KPK. SYL dikatakannya meminta agar ini diantisipasi. Sementara untuk SYL sendiri, Kasdi mengatakan empat kali menyeter USD 4.000. Meski tidak tahu pasti untuk apa, tapi dikatakannya sebagai anggaran operasional menteri.

Baca di hal 11...

KOMUNIKASI PEJABAT KEMANTAN DAN PARA PIMPINAN KPK



SYL- Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata

Berkaitan dengan dukungan program Kementan untuk kampung asal Alexander di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan pesan singkat keduanya, pimpinan KPK dua periode itu disebut meminta dukungan program ke SYL untuk daerah Klaten. Selian itu juga meminta nomor Menteri LHK, Siti Nurbaya.



SYL- Eks Ketua KPK, Firli Bahuri

Terungkap adanya pemberian Rp 800 juta kepada mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Yang diketahui, saat itu ada permasalahan terkait pengadaan sapi di Kementan dan sedang dilidiki oleh KPK. SYL dikatakannya meminta agar ini diantisipasi.



Eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyo- Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Kasdi Subagyo mengakui pernah menerima telepon dari Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, terkait permintaan bantuan mutasi jabatan di Kementan.

**Government (Hal.2)
Menkominfo Tepis
Anak Buahnya
Bekingi Situs
Judi Online**



Menkominfo Tepis Anak Buahnya Bekingi Situs Judi Online



Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (tengah) didampingi Menkominfo Budi Ari Setiadi (kiri) dan Kepala PPAK Ivan Yustiavandana (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6/2024). (dok.ist)

JAKARTA-Anggota DPR mengungkapkan ada oknum pegawai Kominfo yang membekingi situs-situs judi online. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Santoso.

"Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa ada rumor jika ada oknum pegawai Kominfo yang turut bermain melindungi situs-situs judol itu," ujarnya.

Soal itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi membantah anak buahnya ada yang membekingi judi online. "Enggak ada! Kata siapa? Siapa yang ngomong?" kata Budi Arie di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Budi Arie memastikan tidak ada anak buahnya yang membekingi situs judi online. Ia pun meminta agar isu itu dikonfirmasi lagi kepada Santoso.

"Enggak ada. Tanya dia aja," pungkasnya.

Presiden Jokowi telah resmi membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Hari ini, satgas yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menggelar rapat perdana.

Sementara Kominfo ditugaskan untuk menutup server luar negeri yang dipakai untuk judol. Server judol diketahui berada di Thailand, Vietnam hingga Kamboja.

Penutupan akses bertujuan supaya tidak ada ruang bagi pemain judol dalam negeri untuk mengakses situs-situs tersebut. Kominfo juga akan menutup Internet Service Provider (ISP) yang tidak menaati regulasi

Indonesia terkait larangan konten judol.

Ada yang di Server Website Pemda

Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan situs pemerintah pusat disusupi situs judi online. Situs pemda dimasuki backdoor atau pintu belakang yang dilakukan oleh para hacker atau peretas.

"Bahwa ada server-server yang dimasuki backdoor, rata-rata milik pemerintah daerah, ini ada backdoor-nya," kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6/2025).

Namun, Hadi mengatakan BSSN sudah memonitor situs judi online yang 'numpang' di situs pemda.

"BSSN sudah melakukan tindakan awal untuk terus memberikan edukasi agar server-server milik pemerintah daerah aman dari backdoor, dari para hacker. Karena banyak konten yang sembunyi di server tersebut," jelasnya.

Selain edukasi, Hadi mengatakan BSSN juga membantu melakukan pembersihan situs-situs judi online yang 'numpang' tersebut.

"Membantu, clean up termasuk menguji lagi apa bisa berjalan tanpa adanya backdoor. Namun itu terus dilakukan oleh BSSN," ujarnya.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto selaku Ketua Satgas mengatakan hasil rapat disepakati bahwa mulai minggu ini Satgas akan melakukan tiga operasi penegakan hukum.

"Minggu ini, termasuk minggu depan, kita akan melaksanakan tiga

operasi, tiga penegakan hukum yang harus segera diselesaikan," ujar Hadi.

Pertama, kata Hadi, Satgas Pemberantasan Judi Online akan menindaklanjuti temuan PPAK soal 5.000 rekening yang diblokir terkait judi online. Dia menyebut ribuan rekening itu akan dibekukan jika ada kaitannya dengan judi online.

"Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPAK bahwa ada 4.000 sampai 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPAK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri, walaupun PPAK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari," ujarnya.

Kemudian, kata Hadi, Satgas Pemberantasan Judi Online akan melakukan penindakan jual beli rekening. Hadi menyebut para pelaku jual beli rekening ini menysasar masyarakat yang tinggal di desa.

"Yang kedua, kita akan melakukan penindakan jual beli rekening, modusnya pertama adalah pelaku datang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Setelah datang, mereka akan mendekati korban, ngobrol dengan korban," kata Hadi.

"Dan selain itu dilakukan tahapan berikutnya adalah membukakan rekening, KTP, setelah rekening jadi, rekening tersebut diserahkan oleh pelaku kepada pengepul, bisa ratusan rekening, oleh pengepul dijual ke bandar-bandar dan oleh bandar digunakan untuk transaksi judi online," imbuhnya. (wid,rls,tro,ist/dya)

HASIL RAPAT PERDANA SATGAS PEMBERANTASAN JUDI ONLINE

1. Penegakan hukum terhadap 4 ribu sampai 5 ribu rekening yang dicurigai digunakan untuk judi online. Rekening tersebut akan diserahkan kepada Bareskrim Polri dan dibekukan selama 30 hari. Jika selama 30 hari tidak ada pihak yang melapor, maka uang di dalam rekening akan diserahkan kepada negara berdasarkan putusan pengadilan;

2. Mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas memberantas praktik jual beli rekening yang digunakan untuk judi online di kampung-kampung dan desa-desa;

3. Menertibkan penjualan game online yang terafiliasi dengan judi online lewat sistem top up di minimarket.

JERATAN HUKUM UNTUK PELAKU JUDI ONLINE

1. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Pasal 303: Mengatur tentang perjudian secara umum, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda Rp10 juta.

Pasal 303 bis ayat (1): Menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam judi, dengan ancaman hukuman yang sama seperti Pasal 303.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DAN PERUBAHANNYA

Pasal 27 ayat (2): Melarang distribusi, transmisi, atau pembuatan informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian.

Pasal 45 ayat (2): Mengatur sanksi bagi pelanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar.

Note: Selain hukuman pidana, pelaku judi online juga dapat dikenakan sanksi lain, seperti pemblokiran rekening bank, penyiapan aset, dan pencabutan izin usaha.

DPR Pun Terkejut, Biaya Masuk Kuliah Kedokteran Setara Beli Alphard

JAKARTA - Mahalnya biaya masuk kuliah ternyata juga mengejutkan para anggota dewan. Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan menyoroti biaya masuk kuliah Fakultas Kedokteran. Dikatakan, nilainya setara dengan membeli mobil Toyota Alphard.

Padahal, kata dia, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selalu mengeluhkan Indonesia kekurangan dokter.

Hal tersebut Dede Yusuf sampaikan dalam rapat antara Komisi X DPR dan Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkeu, serta Bappenas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Mulanya, Dede Yusuf menyinggung peraturan mengenai pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT). Namun, nyatanya, UKT masih mahal di mana-mana.

"Perguruan tinggi negeri walaupun kemarin sudah ada peraturan baru untuk membatalkan kenaikan UKT, tetapi ternyata masih banyak UKT-UKT ini yang harganya luar biasa sekali," ujar Dede Yusuf.

Dede Yusuf mengungkit pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin semua pihak fokus pada sumber daya manusia (SDM). Jika ingin menyiapkan SDM, kata dia, maka anak-anak generasi penerus harus siap untuk memasuki era industri 5.0.

"Di mana penggunaan pemikiran yang kognitif dan kritis dan lain-lain itu mestinya sudah harus disiapkan menuju 2045. Generasi emas kita butuh waktu kurang lebih sekitar 20 tahun lagi berarti start dari sekarang lah. Kita harus meningkatkan partisipasi," tuturnya.

Dede Yusuf lantas memberi contoh biaya untuk masuk Fakultas Kedokteran yang harganya bisa mencapai satu Toyota Alphard. Dia heran dengan harga pendidikan dokter yang mahal, sedangkan Menkes selalu mengeluhkan kekurangan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan di Gedung Nusantara, Jakarta, Senayan, Rabu (19/6/2024). (Humas DPR)

dokter.

"Untuk masuk kedokteran, Pak, saya sudah dapat ini data dari banyak... Masyaallah itu biaya institusinya bisa beli Alphard satu hanya untuk membayar biaya gedung, belum UKT-nya, mungkin ratusan juta," jelas Dede Yusuf.

"Padahal Menteri Kesehatan selalu mengatakan kita kekurangan dokter. Nah ini kita dilematis," sambungnya.

Sementara, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menilai Indonesia tidak akan mengalami masalah kekurangan biaya pendidikan jika Kemendikbudristek ikut menjadi penentu penggunaan anggaran pendidikan.

"Saya yakin kalau Kemendikbudristek sebagai orang yang lebih paham dunia pendidikan, sudah menghitung biaya pendidikan, menjadi bagian penentu ketika uang itu dari kotak dibagi-bagi, saya yakin kita tidak kekurangan uang untuk membiayai pendidikan," kata Nur dalam rapat yang sama.

Selama Kemendikbudristek tidak menjadi pihak penentu penggunaan anggaran pendidikan, kata dia, biaya pendidikan di Indonesia akan terus

mahal atau memberatkan masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

Lebih lanjut Nur menilai penyelesaian persoalan biaya pendidikan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan.

Pasal 80 dalam PP tersebut mengatur bahwa pemerintah menetapkan besaran anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN, tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.

Berikutnya, disebutkan pula bahwa menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan.

Hitung Ulang Anggaran Sekolah Kedinasan

Di sisi lain, Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mendorong pemerintah melalui

agar menghitung kembali alokasi anggaran sekolah kedinasan dan non-kedinasan untuk tahun anggaran mendatang.

"Panja mendorong pemerintah melalui Kemendikbudristek agar Bappenas dan Kemenkeu melaksanakan PP Nomor 18/2022 tentang Pendanaan Pendidikan, antara lain melalui penghitungan kembali alokasi anggaran pendidikan oleh kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan kedinasan dan non-kedinasan dalam penyusunan RAPBN tahun mendatang," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf.

Dorongan tersebut merupakan salah satu poin kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu.

Sebelumnya persoalan anggaran sekolah kedinasan merupakan salah satu hal yang disoroti Panja Pembiayaan Pendidikan dalam rapat tersebut.

Dede menilai besaran anggaran yang dialokasikan kepada sekolah kedinasan berbeda jauh atau jomplang dengan anggaran pendidikan non-kedinasan yang dialokasikan dari Kemendikbudristek.

"Ada kedinasan-kedinasan yang masuk kuliah dibayar penuh sampai seragam semuanya dibayar, masuk kedinasan langsung diterima. Tapi banyak juga akhirnya tidak diterima dan dengan pembiayaan yang standarnya tidak menggunakan standar Kementerian Pendidikan sehingga terjadi disparitas juga antara dosen-dosen yang mengajar di Kementerian Pendidikan dan dosen-dosen yang mengajar di kementerian/ lembaga lainnya," kata Dede.

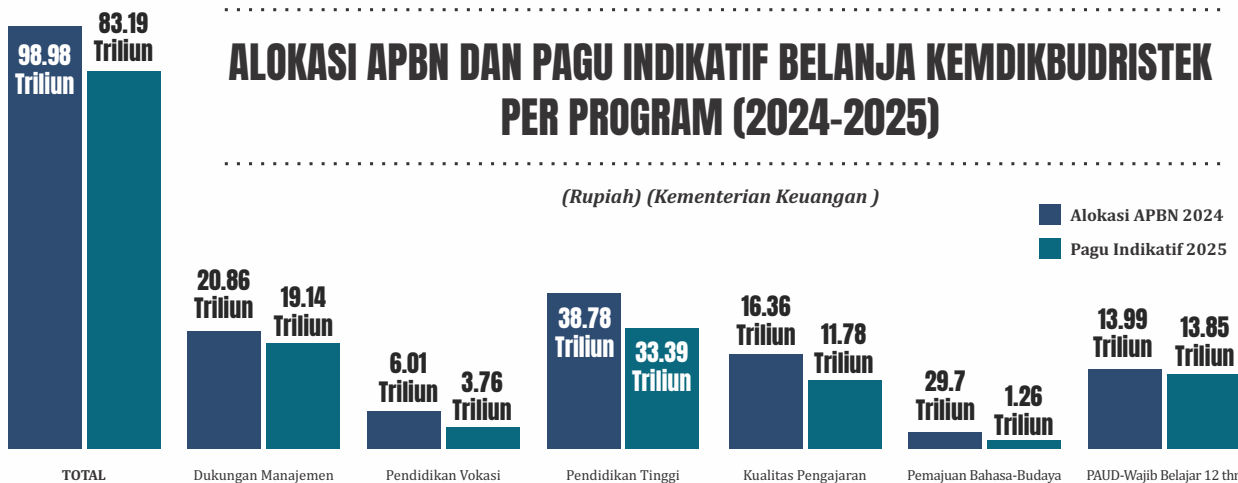
Menanggapi itu Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yulianti memaparkan data alokasi anggaran untuk setiap mahasiswa Perguruan Tinggi Kementerian/ Lembaga (PTKL) atau sekolah kedinasan pada setiap tahunnya.

"Bisa kita lihat betapa besarnya anggaran per mahasiswa per tahun yang dialokasikan. Bahkan ada yang sampai Rp 67.000.000 (rata-rata per mahasiswa per tahun). Jadi kalau kita lihat sangat tinggi betul sekali Pak Pimpinan, sangat tinggi padahal ini sama-sama warga negara Indonesia," ujarnya.

Dalam data yang dipaparkan oleh Kemendikbudristek, diketahui terdapat 24 PTKL di Indonesia, 16 diantaranya dibiayai negara melalui alokasi anggaran pendidikan. (tro,rls,wid,ist/dya)

ALOKASI APBN DAN PAGU INDIKATIF BELANJA KEMDIKBUDRISTEK PER PROGRAM (2024-2025)

(Rupiah) (Kementerian Keuangan)



Tahun 2027 Warga Tak Lagi Bebas Beli LPG 3 Kg, Subsidi Tertutup Dilakukan Total

JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan penyaluran subsidi LPG 3 kg secara tertutup atau berbasis konsumen, baru total berlaku tahun 2027.

Nantinya, hanya pembeli yang sudah mendaftarkan KTP di Pangkalan resmi Pertamina dan termasuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang berhak mendapatkan gas melon tersebut.

Peta jalan transformasi penyaluran subsidi LPG 3 kg memiliki beberapa tahapan.

Pertama, dimulai dengan terbitnya Kepmen ESDM No 37 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang LPG tertentu tepat sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No 99 Tahun 2023 tentang penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG tertentu tepat sasaran.

Kemudian mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG 3 kg di subpenyalur atau pangkalan resmi dapat dilakukan oleh pengguna yang terdata, sementara yang belum terdaftar wajib mendaftar sebelum bertransaksi.

Pendataan dan pencocokan data pengguna LPG 3 kg dalam sistem berbasis web sudah dilakukan mulai 1 Maret 2023. Kemudian mulai 1 Juni 2024, seluruh pencatatan transaksi di subpenyalur dilakukan melalui merchant apps Pertamina (MAP), kecuali 689 subpenyalur di daerah yang terkendala sinyal internet.

Arifin menuturkan, transformasi tahap 2 penyasaran pengguna LPG 3 kg baru akan diterapkan setelah diterbitkan payung hukum kriteria pengguna isi ulang LPG 3 kg, melalui revisi Perpres No 104 Tahun 2007 yang sedang menunggu persetujuan izin prakarsa dari Presiden Jokowi.

"Apabila revisi Perpres tersebut ditetapkan kuartal IV 2024, maka sasaran pengguna LPG 3 kg dapat



Pekerja menaikkan tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram ke atas truk di Bandung, Jawa Barat, Senin (29/4/2024).ANTARA

diimplementasikan 2025 dan tahun selanjutnya," pungkasnya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memastikan kewajiban pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP dimulai 1 Juni 2024. Meskipun begitu, masyarakat yang mampu alias orang kaya masih bisa mengakses komoditas subsidi ini.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan saat ini langkah Pertamina adalah membuka pendaftaran KTP untuk mengetahui pemetaan konsumen LPG 3 kg.

Nicke mengakui, meskipun seharusnya masyarakat yang berhak hanya Desil 1-7 berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), namun masyarakat mampu atau golongan Desil 8-10 masih bisa membeli LPG 3 kg.

"Kami melakukan pendataan menggunakan KTP untuk memetakan, sebetulnya kami mendapatkan pemetaan Desil 1 sampai 10 itu semuanya menikmati," katanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR, Selasa (28/5/2024).

Pertamina mencatat sudah ada

41,8 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang mendaftar untuk subsidi tepat LPG per 30 April 2024. Dari jumlah tersebut, 88 persen pendaftarannya berasal dari sektor rumah tangga.

Rinciannya, 35,9 juta NIK berasal dari sektor rumah tangga, 5,8 juta NIK berasal dari sektor usaha mikro, 70,3 ribu NIK berasal dari pengecer, 29,6 ribu NIK dari nelayan sasaran dan 12,8 ribu NIK petani sasaran.

Kuota Naik 8,2 Juta Ton di 2025

Di sisi lain, Komisi VII DPR RI sepakat untuk menaikkan alokasi subsidi liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Komisi yang membidangi urusan energi itu menaikkan alokasi LPG 3 kg tahun depan ke level 8,2 juta ton atau lebih tinggi 2,1% dari kuota tahun ini sebesar 8,03 juta ton.

"Volume LPG 3 kilogram sebesar 8,2 juta ton," kata Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno saat rapat kerja penetapan Asumsi Dasar Sektor ESDM RPABN Tahun 2025, Jakarta, Rabu

(19/6/2024).

Sementara itu, komisi energi bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menetapkan Indonesian crude price (ICP) di rentang US\$80 per barel sampai dengan US\$85 per barel.

Adapun, asumsi lifting migas pada RAPBN Tahun 2025 diharapkan sampai di level 1,603 juta boepd sampai dengan 1,652 juta boepd.

Perinciannya, lifting minyak ditetapkan di rentang 600.000 bopd sampai dengan 605.000 bopd. Selanjutnya, lifting gas bumi berada di rentang 1,003 juta boepd sampai dengan 1,047 juta boepd.

"Untuk cost recovery disepakati US\$8,25 miliar sampai dengan US\$8,5 miliar," kata Eddy.

Nyuk volume BBM bersubsidi meliputi minyak solar dialokasikan sebesar 18,5 juta kiloliter sampai dengan 19 juta kiloliter. Adapun, alokasi minyak mentah pada RAPBN 2025 ditetapkan sebesar 0,55 juta kiloliter sampai dengan 0,58 juta kiloliter.

"Subsidi listrik mencapai Rp84 triliun sampai dengan Rp88,36 triliun," kata dia. (tro,wid,rls,ist/dya)

Jumlah NIK yang Terdaftar dalam Program Subsidi LPG 3 Kg (30 April 2024)

Rumah tangga

35,9 Juta

Usaha mikro

5,8 Juta

Pengecer

70.300

Nelayan

29.600

Petani

12.800

Sumber : PT Pertamina (Persero)

85,96%

PERSENTASE RUMAH TANGGA INDONESIA BERDASARKAN BAHAN BAKAR UTAMA UNTUK MEMASAK (MARET 2023)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

9,82%

2,45%

0,95%

0,30%

0,04%

0,02%

0,45%

LPG

Kayu bakar

Minyak tanah

Jaringan gas kota/biogas

Listrik

Briket/arang

Bahan bakar lainnya

Tidak memasak di rumah

Babak Baru Syarat Usia Pilkada 2024 Usai Diubah MA, Kini Digugat ke MK

JAKARTA- Lima bulan jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, bola liar soal syarat usia calon masih terus bergulir. Terbar, dua orang mahasiswa, Fahrur Rozi dari UIN Syarif Hidayatullah dan Anthony Lee dari Podomoro University, melayangkan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam dokumen gugatan yang dilayangkan pada 11 Juni itu, keduanya meminta agar MK memberlakukan tafsir yang jelas terhadap syarat usia calon kepala daerah, yakni terhitung saat penetapan calon.

"Sudah benar dan tepat jika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerjemahkan persyaratan usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas ke dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020," tulis mereka dalam permohonan uji materi itu.

Masalahnya, PKPU itu belakangan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Partai Garuda secara kilat. MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung saat penetapan pasangan calon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih.

MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada. Putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran jadwal pelantikan kepala daerah terpilih boleh jadi berbeda-beda, meskipun pilkadanya berlangsung serentak pada 27 November nanti. Jadwal pelantikan itu bisa berlainan tergantung adanya

sengketa hasil Pilkada 2024 atau tidak di wilayah tersebut.

Proses sidang sengketa di MK pun akan memakan waktu lebih. Belum lagi, jika memang terdapat pelanggaran atau ketidakabsahan suara, MK dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dalam kurun tertentu.

Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan potensi masalah seandainya kepala daerah terpilih ternyata belum memenuhi syarat usia pada saat jadwal pelantikan yang bersangkutan.

Fahrur Rozi dan Anthony Lee menilai, putusan MA itu justru menimbulkan ketidakpastian hukum. "Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 (juga) telah menggeser posisi MA dari negative norm (pembatal norma) menjadi positive norm (pembuat norma) yang secara kelembagaan bukan-

lah kewenangan MA, melainkan kewenangan pembuat legislatif," jelas mereka.

Mereka pun meminta supaya MK, dalam mengadili permohonan ini, memanggil Presiden dan DPR serta pihak terkait yang berkaitan langsung dengan pasal yang diuji ini. Mereka menegaskan, gugatan ini dilatarbelakangi fakta bahwa mereka termasuk sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang.

"Sehingga juga berhak untuk mendapatkan pasangan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip kepastian hukum," pungkaskan keduanya. (wid,rls,tro,ist/dya)

DALIL-DALIL POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya mengatur tentang hak untuk memperoleh kesempatan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan (Right To Be Candidate) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, pemohon ingin memberikan penegasan khusus terhadap frasa "mencalonkan diri dan dicalonkan" yang memiliki arti suatu proses untuk menjadi calon atau ditetapkan sebagai calon sebagai calon kepala daerah.

2. Bahwa kemudian Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang beberapa prasyarat untuk ditetapkan baik sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang di antaranya tercantum pada bagian huruf e, yaitu: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

3. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut berada dalam satu tarikan napas sehingga oleh karenanya menjadi sangatlah jelas dan terang benderang bahwa ketentuan "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun" harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Begitu pula ketentuan "berusia paling rendah 25 (Dua puluh lima) tahun" harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

4. Bahwa oleh karena itu, sudah benar dan tepat jika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerjemahkan persyaratan usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas ke

dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang berbunyi: (4) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

Dalam Petitumnya, Mahkamah Konstitusi dimohon berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon";

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

PDIP dan PAN Sepakat Usung 6 Kepala Daerah Petahana di Pilkada Jatim

JAKARTA- DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim) dan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim sepakat memberikan surat penugasan kepada enam kepala daerah yakni Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Kabupaten Kediri, Surabaya, dan Sumenep untuk ikut serta di kontestasi Pilkada 2024. Surat tugas itu diberikan secara langsung kepada masing-masing kepala daerah di aula Kantor DPW PAN Jatim di Surabaya pada Rabu (19/6/2024).

"Kami terima kasih atas respon yang luar biasa atas komunikasi sebelumnya yang terjalin baik. Ketika kita sudah mendapat rekomendasi, targetnya adalah menang bersama,"

kata Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Budi Sulistyono (Kanang).

Kanang menjelaskan, rekomendasi itu menjadi dasar melanjutkan perjuangan. Tak hanya sampai pada kemenangan, tetapi berkesinambungan hingga masa jabatan berakhir.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PAN Jatim, Ahmad Rizki Sadig menyatakan bahwa keputusan ini merupakan kloter pertama dan terbanyak dari partai koalisi yang telah dipertimbangkan selama satu bulan.

"Di surat tugas kita itu memberi kewenangan untuk calon kepala

daerah memilih calon wakil kepala daerah," katanya.

Ahmad Rizki kemudian menyampaikan apresiasi atas komunikasi intens antara bakal calon kepala daerah dengan pihak terkait. Dirinya menegaskan akan mengawal proses penugasan hingga tahap rekomendasi ke DPP PAN dan pengumuman KPU pada Agustus mendatang.

"Kami berharap surat tugas yang kami luncurkan ini insyaAllah tidak berubah sampai surat keputusan di Agustus mendatang," ujar Ahmad Rizki.

Salah seorang penerima rekomendasi, Bupati Ngawi Ony Anwar mengaku bersyukur atas rekomendasi tersebut, dan berjanji akan melanjutkan perjuangan bersamarakyat.

"Ini menjadi energi untuk Kabupaten Ngawi dan jadi komitmen meneruskan sinergi ke depan. Support dari teman-teman PAN juga luar biasa," katanya. Dengan semangat serupa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa pengalaman pertamanya bersama PAN kali ini menjadi warna baru yang diyakini dapat memperkuat sinergi demi warga Surabaya. (pra,rls,ist/dya)

Pemkot Malang Identifikasi 900 Kasus TBC hingga April 2024

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang semakin intensif dalam menangani penyebaran penyakit Tuberculosis (TBC) dengan target eliminasi pada tahun 2035. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif menyebutkan, per April 2024, sebanyak 900 kasus TBC telah teridentifikasi di Kota Malang.

Identifikasi tersebut dikatakannya sebagai bagian dari upaya untuk menemukan dan mengobati sebanyak mungkin kasus TBC, guna memutus rantai penularan di tahun 2035 nanti.

Menurut Husnul, langkah ini juga sejalan dengan target nasional yang menetapkan prevalensi TBC sebesar 6 per 100 ribu penduduk pada tahun 2035.

"Jadi di tahun 2035 nanti diharapkan kalau penduduk Kota Malang ada 1 juta, maka di situ hanya ada 60 penderita TBC, inilah yang disebut sudah eliminasi TBC," ujar Husnul, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (19/6/2024).

Husnul menjelaskan, di Kota Malang, pada tahun 2024 ini menargetkan untuk dapat menemukan 3



Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif. (Santi/Lenteratoday)

ribu kasus TBC. Husnul menganggap, dengan teridentifikasi-kasusnya 900 kasus per April 2024 kemarin, merupakan angka yang positif dalam konteks pengendalian penyakit tersebut.

"Jadi kalau kasus ditemukan sebanyak banyaknya, itu lebih bagus. Karena itu akan memutus rantai

penularan sedini mungkin. Sehingga di 2035 hanya tersisa 60 penderita TBC. Kalau sudah banyak ditemukan, kemudian kita obati sampai sembuh, sehingga rantai penularan bisa diputus," jelasnya.

Lebih lanjut, Husnul menyampaikan, untuk setiap kasus TBC yang

ditemukan, Dinkes Kota Malang harus mengidentifikasi hingga 15 orang yang pernah melakukan kontak erat dengan penderita. Dijelaskannya, langkah ini penting untuk memastikan tidak ada penularan lebih lanjut dan memastikan penanganan yang tepat bagi orang yang berisiko.

Terkait hal ini, pemeriksaan akan dilakukan menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk mendiagnosa secara pasti. Menurut Husnul, pengobatan TBC dapat dijangkau masyarakat di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terdekat.

"Pengobatan harus dikonsumsi penuh selama 6 bulan agar pasien dinyatakan sembuh. Sehingga kalau sudah 6 bulan minum obat kemudian pemeriksaan terakhir TCM nya negatif, itu yang dikatakan sembuh," paparnya.

Mengakhiri pernyataannya, Husnul juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika mendapati gejala TBC, serta mengikuti prosedur pengobatan dengan disiplin. "Partisipasi masyarakat sangat penting. Mereka bisa melaporkan gejala ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat," tandasnya. (Santi/Dya)

Produktivitas Padi di Desa Pendem Tak Optimal Pj Wali Kota Batu: Kekurangan Air



Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai saat melakukan panen padi di Desa Pendem. (Dok. Prokopim Kota Batu)

BATU - Produktivitas padi di Desa Pendem, Kota Batu, dinilai belum optimal. Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyoroti masalah kekurangan air sebagai faktor utama yang menghambat peningkatan produktivitas panen padi di desa tersebut.

"Desa Pendem itu sebenarnya memiliki potensi lahan padi seluas 250 hektare. Namun karena kekurangan

suplai air, panen hanya bisa dilakukan 1-2 kali dalam setahun," ujar Pj Aries, Rabu (19/6/2024). Kurang optimalnya produktivitas diketahui usai dilakukannya panen raya pada awal Juni 2024 lalu.

Dalam hal ini, Aries menegaskan masalah irigasi menjadi tantangan utama dalam optimalisasi lahan pertanian padi di Desa Pendem.

Diketahui, panen raya tersebut

dilaksanakan di lahan seluas 32 hektare milik warga yang tergabung dalam kelompok tani (poktan). Menurut Aries, panen raya tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan pada tahun ini, dengan frekuensi panen padi di Desa Pendem hanya mencapai 1-2 kali dalam setahun.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan produktivitas panen, Aries menyebutkan para petani telah menyampaikan keluhannya kepada Pemkot Batu. Menurutnya, pemerintah akan hadir untuk memberikan bantuan dalam bentuk pemasangan sistem irigasi bawah tanah.

"Nah dengan adanya sistem ini, diharapkan potensi lahan padi bisa dimaksimalkan hingga mencapai 400-600 hektare, dengan produktivitas tahunan mencapai 6,21 persen dari total lahan potensial," tambahnya.

Aries juga menegaskan pentingnya peningkatan struktur sarana pertanian untuk mendukung produktivitas para petani. Salah satu aspek utama yaitu dengan sistem irigasi yang efisien, yang memastikan cukupnya pasokan air ke lahan

pertanian.

Selain itu, pembangunan dan perawatan saluran air yang memadai juga krusial untuk mendistribusikan air secara merata ke seluruh lahan pertanian, mencegah masalah kelebihan atau kekurangan air yang bisa merugikan pertumbuhan tanaman.

"Karena mereka adalah pahlawan kita di bidang pangan. Kami akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan TNI untuk mencari inovasi yang bermanfaat di bidang pertanian. Saya melihat banyak sekali alat yang bisa dimanfaatkan oleh petani," tambahnya.

Dalam kesempatannya, Aries juga menilai Desa Pendem telah menunjukkan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian meskipun dengan segala keterbatasan. Aries berharap, desa ini dapat menjadi wilayah unggulan di sektor pertanian tanaman pangan di Kota Batu.

"Karena selain padi, komoditas lain seperti sayur mayur yang telah menjadi unggulan juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing wilayah Kota Batu," tegasnya. (Santi/Dya)



SITI NURHALIZA SENANG BISA SAPA PENGGEMAR INDONESIA LAGI

PENYANYI asal negeri Jiran yang juga populer di Indonesia, Siti Nurhaliza tampil menjadi line up baru konser *Hitman Returns: David Foster & Friends* di ICE BSD, Sabtu (15/6/2024). Menggantikan Jessie J yang batal tampil.

Meski dadakan, karena hanya menggantikan Jessie J, Siti tetap merasa senang karena akhirnya, ia bisa menyapa penggemarnya di tanah air setelah sekian lama tak tampil.

"Terima kasih, karena telah memilih saya untuk bergabung dengan David Foster," ujarnya dalam konferensi pers *Hitman Returns: David Foster & Friends*, Sabtu (15/6/2024).

Kepada awak media, Siti Nurhaliza menjelaskan penampilannya kali ini menjadi yang ketigakalinya berkolaborasi dengan David Foster.

"Saya [dan David Foster] pertama kali bertemu di F1 di Malaysia. Itu kali pertama saya dijemput untuk menyanyi bersama Mr. David Foster. Kemudian saya dijemput sekali untuk konser di Malaysia dan ini merupakan kali ketiga bersama David Foster," jelasnya.

Siti Nurhaliza mengatakan, bisa berkolaborasi dengan David Foster, seperti mimpi yang menjadi nyata baginya.

Oleh karena itu, ia berjanji akan menyuatkan penampilan yang terbaik. Termasuk kembali mendedangkan lagu *Bukan Cinta Biasa* miliknya yang pernah booming di Indonesia.

Dalam momen konferensi pers, Siti pun menyentil dan blak-blakan mengungkapkan keinginannya agar David Foster juga bisa membuatnya satu lagu saja.

"Jadi Mr. David Foster, bisakah kamu membuatkan saya satu lagu saja?," tanya Siti Nurhaliza langsung kepada David Foster.

Sejak tahun 2000an, Siti Nurhaliza telah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Beberapa kali bahkan Siti tampil menghibur fansnya di Tanah Air. Dia menyebut Indonesia sebagai rumah kedua baginya.

Profil

Siti Nurhaliza lahir di Pahang,

Malaysia, pada 11 Januari 1979. Dia merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dari ayah seorang polisi bernama Tarudin Ismail. Sementara ibunya, Siti Salmah Bachik merupakan seorang ibu rumah tangga dan pedagang.

Bakat menyanyi ibu dua anak tersebut mulai terlihat sejak usia 6 tahun. Saat itu, Siti yang tengah mengenyam pendidikan taman kanak-kanak menyanyikan lagu daerah berjudul *Sirih Pinang* pada pesta akhir tahun ajaran.

Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan di Clifford National Primary School dan sekolah menengah di Clifford National Middle School Kuala Lipis, Pahang.

Tumbuh di keluarga sederhana, Siti Nurhaliza kerap membantu ibunya berdagang. Dia bahkan mengaku jika pengalamannya berjualan membantunya untuk bisa hidup dengan hemat.

Dia juga menyebut, berkomunikasi dengan pelanggan juga membuat kemampuan vokalnya meningkat.

Pada usia 13 tahun, Siti Nurhaliza kerap mengikuti pamannya, Abdul Rahim Bachik untuk tampil dalam berbagai acara seperti pesta pernikahan. Berkat hal tersebut, namanya mulai dikenal sebagai penyanyi.

Setelah menjadi juara Bintang HMI pada 1995, Siti Nurhaliza mendapat tawaran rekaman dari Suria Record.

Berkat dukungan keluarga, guru dan teman-temannya, Siti yang masih berusia 16 saat itu menerima tawaran tersebut dan mulai menjajaki dunia hiburan Malaysia.

Hingga saat ini, Siti Nurhaliza telah merilis 8 album solo, 2 album konser live dan beberapa album duet dan kompilasi. Namanya mulai dikenal di Indonesia berkat lagu andalannya, *Betapa Ku Cinta Padamu*.

Selain sukses sebagai penyanyi, Siti juga seorang pengusaha sukses. Siti adalah pemilik label rekaman, Siti Nurhaliza Productions selain manjadi

brand merk Parfum dan sejumlah produk lainnya.

Selain itu, Siti juga menjadi bintang iklan sejumlah produk, termasuk Pepsi, Konica Minolta, Pantene Samsung, dll. Dari multisukses tersebut, Siti dinobatkan sebagai artis terkaya di Malaysia (*The Most Richest Artistes*) - *Bisnis/KapanLagi*





DEMENSIA PALING BANYAK DIALAMI JEMAAH HAJI INDONESIA DI MAKKAH

DEMENSIA menempati urutan ketiga penyakit terbanyak yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI Makkah).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan bahwa terdapat 30 pasien demensia yang dirawat di ruang rawat inap psikiatri KKHI Makkah, hingga Kamis (13/6/2024).

Dokter spesialis jiwa di KKHI Makkah Ahmad Andi Samegu mengatakan bahwa demensia adalah kondisi sindrom penyakit gangguan otak yang bersifat jangka panjang dan kronis, dan bukan baru terjadi.

Menurutnya, rata-rata pasien demensia berusia di atas 60 tahun, bahkan ada yang berusia 95 tahun dan sudah mengalaminya sejak di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa dalam ilmu kedokteran, gangguan jiwa dilihat dari tiga aspek, yakni biologi, psikologis, dan sosial.

Adapun pada aspek biologis, Ahmad menjelaskan bahwa gangguan struktur otak yang mengalami atrofi serebri sehingga terjadi penurunan fungsi, ditambah dehidrasi, gangguan elektrolit, dan faktor suhu tinggi.

Dia menjelaskan pada aspek psikologis, orang tua atau lansia umumnya baru pertama kali meninggalkan kampung halaman, naik pesawat, dan bertemu orang asing, sehingga adaptasinya berbeda.

Kemudian pada aspek sosial, dia menjelaskan bahwa jemaah berada di tempat baru yang tidak dikenal tanpa pendamping dan orang yang dikenal,

dan harus melakukan aktivitas seperti makan dan mandi sendiri, padahal di Indonesia mereka dibantu. Selain itu di kloter, mereka juga dikucilkan dan ditinggal sendiri di kamar.

“Sudah ditegaskan bahwa yang boleh lolos istithaah kesehatan hanya yang mengalami demensia ringan. Demensia sedang dan berat itu seharusnya tidak lolos istithaah dan tidak bisa berangkat,” katanya, dalam keterangan resmi, pada Minggu (16/6/2024).

Lebih lanjut, dia juga menyatakan bahwa hampir 90% pasien di KKHI Makkah adalah pasien demensia.

Menurutnya, kasus lain selain demensia adalah depresi skizofrenia, yang sudah diderita pasien sejak masih di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa pasien tersebut tidak istithaah tetapi tetap dapat berangkat dengan kewajiban minum obat.

Namun, para pasien ini tidak meminum obatnya sehingga penyakitnya kambuh. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pasien yang tantrum atau mengamuk hingga tahap agitasi atau gelisah berat akan diberikan tata laksana sesuai kondisinya.

Ada pasien yang cukup minum obat, ada yang perlu disuntik. Menurutnya, penyebabnya juga harus dikoreksi. Rata-rata mereka dirawat karena dehidrasi dan gangguan elektrolit.

Hal ini yang perlu dikoreksi dengan bekerja sama dengan dokter

spesialis lainnya. Kemudian dia menjelaskan, jika ada pasien yang hilang kendali dan gaduh gelisah, akan diupayakan dengan cara persuasif.

Jika pasien gaduh gelisah di kloter, di KKHI mereka ditenangkan dengan bahasa lokal, diajak berkomunikasi, dan diberikan rasa aman hingga tenang.

“Kita tidak tahu masa tua kita, apakah sehat normal, atau apakah ada yang merawat kita? Bisa saja mabrurnya petugas karena merawat orang yang tidak kita kenal,” tambahnya.

Mengutip halodoc, demensia adalah istilah untuk sekelompok gejala yang memengaruhi memori, kemampuan berpikir, dan kemampuan sosial yang cukup parah dan mengganggu kehidupan sehari-hari.

Meskipun demensia umumnya ditandai dengan hilangnya ingatan, tetapi kondisi ini berbeda dengan amnesia.

Ketika seseorang kehilangan ingatan, bukan berarti orang tersebut mengidap demensia, meskipun sering kali hal tersebut merupakan salah satu tanda awal dari kondisi ini.

Penyebab Demensia

Demensia disebabkan oleh kerusakan pada sel saraf otak di bagian tertentu sehingga menurunkan kemampuan berkomunikasi dengan saraf tubuh lainnya, dan mengakibatkan kemunculan gejala sesuai dengan area otak yang mengalami kerusakan.

Ada berbagai macam kondisi dalam kasus demensia. Ada jenis demensia yang berkembang secara progresif, dan ada juga kondisi lain yang menyerupai demensia yang terjadi karena reaksi tertentu dan dapat ditekan.

Demensia progresif adalah kondisi yang disebabkan oleh kerusakan sel saraf otak tertentu dan dapat memburuk seiring waktu. Kondisi ini umumnya tidak dapat dipulihkan secara tuntas.

Beberapa jenis demensia progresif meliputi penyakit Alzheimer, demensia vaskuler, lewy body dementia, demensia frontotemporal, dan demensia campuran (Bisnis/halodoc)



Nilai Transaksi Judi Online Cs Tembus Rp600 Triliun

PUSAT Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan nilai transaksi keuangan mencurigakan pada kuartal I/2024 tahun ini menembus Rp600 triliun, termasuk untuk judi online.

Nilai tersebut lebih tinggi anggaran untuk bangun Ibu Kota Negara (IKN) yang senilai Rp466 triliun. Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah melaporkan hingga Mei 2024 terdapat 14.575 transaksi keuangan mencurigakan.

Sementara pada 2022 terdapat sebanyak 11.222 transaksi dan 2023 ada 24.850 laporan transaksi keuangan mencurigakan.

Berdasarkan catatan tersebut, Natsir menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar dengan persentase 32,1%. Hal ini mengalahkan transaksi keuangan mencurigakan tindak pidana korupsi yaitu sebesar 7%.

"Secara akumulasi, judi online bagian terbesar dari laporan transaksi keuangan mencurigakan yang kita terima, itu sampai 32,1%.

Kalau penipuan 25,7%, tindak pidana lain 12,3%, korupsi malah 7%," ucap Natsir," paparnya dalam diskusi online Mati Melarat Karena Judi.Ironisnya, dari angka-angka akumulasi perputaran judi online itu dari waktu ke waktu terus meningkat.

Pada 2021, sebutnya, telah terdeteksi senilai Rp57 triliun. Selanjutnya, pada 2022 melonjak menjadi Rp81 triliun.

"Dan pada 2023 menjadi Rp 327 triliun," imbuhnya.

Angka-angka tersebut menunjukkan judi online menjadi salah satu problem yang meresahkan. Angka transaksi keuangan mencurigakan dari judi online ini juga membuat Presiden Jokowi pun membentuk satgas yang dipimpin oleh Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto.

"Sehingga Bapak Presiden melalui Ketua Komite Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga sebagai Menko Polhukam membentuk satgas, ya. Satgas ini dipimpin oleh Pak Menko Polhukam. Harapannya dengan satgas ini tentu penekanan pencegahan pemberantasan terkait judi ini bisa lebih efektif dilakukan," harapnya.

Blokir PPATK mengklaim telah memblokir sebanyak lebih dari 5.000 rekening yang terindikasi digunakan untuk melakukan transaksi untuk judi online.Natsir Kongah memaparkan jumlah pemblokiran ribuan rekening itu terus meningkat dan telah dilakukan selama periode Januari hingga Mei 2024.Hal itu dapat dilakukan karena Undang -Undang atau UU memperbolehkan PPATK untuk melakukan pemblokiran rekening yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Berdasarkan UU yang ada, PPATK bisa memblokir rekening yang terindikasi tindak pidana pencucian



uang selama 5 hari ditambah 15 hari. Setelah itu blokir tersebut bisa ditindaklanjuti oleh penyidik."Itu terus meningkat ya, sampai sejauh ini sudah ada 5.000 rekening yang kita blokir," ujar Natsir Kongah dalam diskusi online Polemik Mati Melarat Karena Judi, Sabtu (15/6/2024).

Dia juga mengidentifikasi sebanyak 3,2 juta warga Indonesia teridentifikasi bermain judi online. Pemain judi online ini ada pelajar hingga ibu rumah tangga.Pemain judi online yang terindikasi tersebut, rata-rata mereka bermain di atas

Rp100.000, hampir 80% dari 3,2 juta pemain yang teridentifikasi itu."Ada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan ini cukup mengkhawatirkan untuk kita sebagai anak bangsa," imbuhnya.

Dia juga memaparkan PPATK berhasil mengendusnya karena sudah mengetahui mekanisme nya bagaimana pelaku dikirim ke bandar kecil, dari bandar kecil dikirim ke bandar besar, dan sebagian bandar besar yang dikelolakan di luar negeri.

"Banyak juga ternyata uang dari judi online itu dilarikan ke luar negeri, dan nilainya itu di atas Rp 5 triliun lebih, jadi seperti itu kita lakukan identifikasi," katanya (Lenteratoday)



TAMAN LITERASI BLOK M TEMPAT UNTUK BERLIBUR



SEJUMLAH masyarakat mengunjungi Taman Literasi Martha Christina Tiahahu atau yang dikenal dengan nama Taman Literasi Blok M, Jakarta Selatan untuk menikmati liburan menjelang akhir pekan.

Annisa (21), seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Bekasi memilih untuk berlibur bersama teman-temannya di Taman Literasi Blok M lantaran akses yang mudah dijangkau dengan transportasi publik.

"Saya baru pertama kali ke sini. Penasaran aja seperti apa suasana di sini, mumpung libur kuliah," ujar Annisa.

Perempuan yang tinggal di Cikarang, Jawa Barat itu mengaku memanfaatkan KRL Commuter Line dari Stasiun KRL Cikarang menuju ke Stasiun KRL Sudirman.

Dari Stasiun KRL Sudirman, Annisa dan teman-temannya berpindah moda transportasi menggunakan Moda Raya Terpadu (MRT) menuju Stasiun MRT Blok M BCA.

Ia mengatakan, Taman Literasi Blok M cukup mudah dijangkau dengan transportasi publik sehingga tidak menghabiskan biaya banyak seperti membawa kendaraan pribadi.

Menurut Annisa, suasana Taman Literasi Blok M sangat nyaman untuk sekadar duduk-duduk di bawah pohon

atau berkeliling dan menikmati kuliner yang ada di kawasan tersebut.

"Nyampai di Stasiun Blok M tinggal menyeberang sudah sampai. Jalan kaki dekat jadi tidak perlu naik ojek online juga," katanya.

Senada dengan Annisa, salah satu pelajar SMA di Jakarta Selatan bernama Agnes juga menyampaikan hal yang sama. Namun demikian, Agnes mengaku cukup rutin berkunjung ke Taman Literasi Blok M usai pulang sekolah di hari Jumat.

Biasanya, Agnes beramai-ramai dengan temannya menikmati makan siang dari beberapa kafe ataupun tenant yang ada di lokasi tersebut.

"Aku cukup sering ke sini, apalagi kalau hari Jumat. Biasanya makan siang sambil internetan pakai wifi di sini," katanya. Ia menyebut, Taman Literasi Blok M paling nyaman dikunjungi pada sore ketika matahari sudah tidak terlalu panas atau malam hari ketika lampu-lampu penerangan sudah dinyalakan.

Sementara itu, Rangga (33) mengunjungi Taman Literasi Blok M bersama istri dan anaknya untuk sekadar menikmati suasana dan berfoto-foto. Pria asal Ciputat, Tangerang Selatan itu diajak oleh istrinya karena sang buah hati sudah memasuki libur sekolah usai ujian kenaikan kelas.

Menurut Rangga, taman ini cukup mudah dijangkau dengan moda transportasi kendaraan roda dua dari tempat tinggalnya. Selain itu, pengunjung juga tidak kesulitan mencari tempat parkir.

"Anak saya sudah libur jadi diajak ke sini sama istri saya. Mau foto-foto aja karena tempatnya cukup bagus, bersih dan nyaman, instagrammable istilahnya" katanya.

Taman yang diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada September 2022 lalu ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan literasi, budaya, dan ekonomi kreatif.

Taman Literasi Blok M tidak hanya menghadirkan suasana tenang dan sejuk di tengah kesibukan lalu lintas dan polusi Jakarta, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas inklusif seperti Ruang Baca, Plaza Bunga, Plaza Anak, dan lainnya.

Selain itu, taman ini menyediakan area kuliner dengan berbagai pilihan makanan serta beberapa spot yang menarik untuk dijadikan tempat berfoto.

Adapun masyarakat yang berkunjung ke Taman Literasi Blok M menggunakan kendaraan pribadi, dapat memarkirkan kendaraannya di Plaza Blok M atau Mal Blok M.

Sementara itu, bagi yang menggunakan transportasi publik dapat memanfaatkan bus Transjakarta dengan tujuan Blok M, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dengan tujuan stasiun Blok M, atau memanfaatkan jasa ojek online maupun taksi online.

Ada berbagai fasilitas yang terdapat di Taman Literasi Blok M, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu ini. Di antaranya, taman literasi yang baru direvitalisasi ini memiliki enam plaza yaitu Plaza Utara, Plaza Kabaresi, Plaza Bunga, Plaza Selatan, Plaza Anak serta Plaza Timur.

Kemudian Galeri Jak Habitat, Paviliun Literasi, Amphitheater Banda, Taman Atap Abubu, Plaza Kabaresi, akses menuju MRT. Ada pula mushola dan ruang menyusui. Selain itu, seperti dilansir Instagram @tamanliterasi.jkt, Taman Literasi Blok M juga tersedia fasilitas perpustakaan, plaza anak, healing garden, dan amphitheater (Antara/detik)



Ada Nama Menteri ... (dari Hal 1)

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata disebut pernah melakukan percakapan dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL pada 2022 lalu. Hal tersebut diungkap oleh mantan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono padasidang kasus pemerasan di Kementan, Rabu (19/6/2024).

Kasdi dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa SYL. Kasdi awalnya ditanya ihwal apabila ada perkenalan antara dirinya dengan pimpinan KPK. Dia membantah hal tersebut. Meski demikian, SYL disebut pernah memiliki percakapan melalui pesan singkat dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Percakapan itu diketahui Kasdi saat dikonfirmasi oleh penyidik terkait dengan handphone pribadi SYL. "Chatting antara siapa?," tanya Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024).

"Antara pak menteri dengan salah satu pimpinan KPK," jawab Kasdi. "Siapa namanya?," tanya Hakim Rianto.

"Pada waktu itu adalah pak Alex Marwata," ujar Kasdi.

Meski demikian, Kasdi menyebut percakapan yang diduga terjadi antara Alexander Marwata dan SYL bukan perihal kasus pemerasan di Kementan. Sebab, terang Kasdi, dia mengingat penyelidikan kasus pemerasan di Kementan belum dilakukan oleh KPK pada 2022.

Percakapan itu disebut Kasdi berkaitan dengan dukungan program Kementan untuk kampung asal Alexander di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan pesan singkat keduanya, pimpinan KPK dua periode itu disebut meminta dukungan program ke SYL untuk daerah Klaten.

"Kemudian pak Alex menanyakan juga nomornya ibu Siti Nurbaya [Menteri LHK]. Itu yang saya tahu dari chatting-nya," ungkap Kasdi.

Untuk diketahui, jaksa KPK mendakwa SYL, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta memeras pejabat maupun direktorat/lembaga di lingkungan Kementan dengan total mencapai Rp44,54 miliar selama 2020-2023. Di sisi lain, KPK juga menetapkan SYL sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang.

Kasdi Subagyono juga mengakui adanya pemberian Rp 800 juta kepada mantan Ketua KPK Firlil Bahuri. Kasdi pun menceritakan penyerahan uang yang diberikan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) kepada Firlil.

Kasdi mengatakan uang Rp 800 juta itu diberikan SYL terkait penyelidikan KPK soal pengadaan sapi di Kementan. Dia mengatakan SYL meminta agar penyelidikan masalah pengadaan sapi itu diantisipasi.

"Apakah Saudara tahu ada

hubungan, apakah hubungan ini dengan Menteri Pertanian dengan Pak Firlil Bahuri sebagai pimpinan KPK waktu itu ada?" tanya ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6/2024).

"Ada, saya tahu waktu itu, selain dari berita, saya juga diberi tahu oleh Panji karena Panji sering mendampingi Pak Menteri, bertemu dan di...," jawab Kasdi, yang diperiksa sebagai saksi mahkota untuk SYL dan Muhammad Hatta.

"Sering ketemu?" tanya hakim.

"Saya tidak mengatakan sering, tapi yang saya ingin sampaikan adalah ada momen yang di foto di lapangan badminton, itu saja yang saya tahu," jawab Kasdi.

"Apakah Saudara pernah ndak menanyakan kepada ajudannya, waktu itu saksi Panji, untuk apa Pak Menteri Ketemu dengan Ketua KPK di lapangan badminton yang di berita itu?" tanya hakim.

"Mohon izin, Yang Mulia, pada saat itu memang Pak Menteri sendiri pernah sampaikan kepada seluruh jajaran eselon I bahwa ada permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan sapi di Kementan yang bermasalah yang sedang dilidiki oleh KPK. Kemudian Pak Menteri sampaikan agar ini diantisipasi. Nah, itu yang lantas kemudian, arti mengantisipasi itulah maka ada sharing lagi," jawab Kasdi.

'Sharing' yang dimaksud Kasdi adalah patungan uang Rp 800 juta dari eselon I di Kementan. Dia mengatakan permintaan itu juga disampaikan oleh terdakwa Muhammad Hatta.

"Sharing khusus apa ini? Sharing untuk operasional Menteri, lah ini sharing untuk apa lagi?" tanya hakim.

"Jadi begini, setelah disampaikan pada waktu itu diperjelas lagi oleh Pak Hatta bahwa ada kebutuhan Rp 800 (juta) yang akan diserahkan kepada Pak Firlil," jawab Kasdi.

"Itu disampaikan juga oleh Pak Hatta?" tanya hakim.

"Disampaikan oleh Pak Hatta. Maka saya mengonfirmasi," jawab Kasdi.

"Ini sharing ini bukan untuk operasional Menteri lagi nih?" tanya hakim.

"Bukan," jawab Kasdi.

"Jadi untuk kepentingan?" tanya hakim.

"Untuk kepentingan tadi," jawab Kasdi.

"Dikumpulkan?" tanya hakim.

"Rp 800 juta," jawab Kasdi.

Alexander Marwata Membantah

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membantah pernah meminta bantuan program untuk kampungnya kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagaimana pengakuan Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif Kasdi Subagyono dalam persidangan hari ini, Rabu (19/6/2024).

Alex mengaku tidak pernah menghubungi SYL lewat pesan singkat, apalagi untuk meminta bantuan.

"Percakapan WA [WhatsApp] antara Mentan dengan seseorang yang menggunakan foto profil saya (kemungkinan foto saya diambil dari Google). Saya tidak pernah mempunyai dan menyimpan nomor HP mentan atau pejabat Kementan yang saat ini sedang berperkara/disidang di pengadilan tipikor," ujar Alex.

Komunikasi tersebut sempat dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Alex dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan wewenang.

Alex menjelaskan Dewas KPK sudah memeriksa itu dan menyatakan tidak ada pelanggaran. Pengakuan ini serupa dengan pernyataan yang disampaikan Dewas KPK beberapa waktu lalu.

"Saya sudah diklarifikasi Dewas dan sejauh ini tidak ada bukti saya berkomunikasi dengan mentan atau pejabat Kementan yang sedang berperkara," ucap Alex.

Ditelepon Nurul Ghufron

Kasdi Subagyono juga mengakui pernah menerima telepon dari pimpinan KPK, Nurul Ghufron, terkait permintaan bantuan mutasi jabatan di Kementan. Hal itu disampaikan Kasdi saat diperiksa sebagai saksi mahkota dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan.

"Saudara saksi tidak pernah menerima telepon dari salah satu oknum pimpinan KPK?" tanya kuasa hukum SYL, Djamiludin Koedoeboen, dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (19/6/2024).

"Ya, saya terima telepon, pernah, oleh satu pimpinan KPK," jawab Kasdi.

"Siapa itu?" tanya Djamiludin Koedoeboen.

"Bapak Nurul Ghufron," jawab Kasdi.

Kasdi mengatakan Ghufron menelpon dirinya terkait permintaan bantuan mutasi jabatan di Kementan pada 2022. Dia mengatakan permintaan Ghufron itu akhirnya terealisasi.

"Beliau menelepon terkait apa itu?" tanya Djamiludin Koedoeboen.

"Terkait dengan permintaan bantuan untuk memindahkan saudaranya dari Inspektorat II Itjen Kementan ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur," jawab Kasdi.

"Baik, itu tahun berapa itu?" tanya Djamiludin Koedoeboen.

"2022 kalau saya tidak salah," jawab Kasdi.

"Terus? Selanjutnya?" tanya Djamiludin Koedoeboen.

"Ya selanjutnya terealisasi itu," jawab Kasdi.

Dewas KPK sebelumnya mengungkap hubungan Ghufron dengan ASN Kementan yang dibantu mutasi. Anggota Dewas KPK Harjono mengatakan kedua pihak tidak saling kenal.

Harjono juga menjelaskan Nurul Ghufron dengan sosok ASN Kementan yang dibantunya mutasi itu tidak saling kenal. Namun mertua ASN itu merupakan teman Nurul Ghufron.

"Kedekatannya sebenarnya nggak kenal sama dia, yang dimutasi nggak kenal. Itu baik keterangan dari yang dimutasi maupun keterangan dari Pak Ghufron sendiri, sebenarnya nggak kenal. Yang dikenal itu adalah mertua yang dimutasi. Itu temannya," ungkap Harjono di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024). (tro,wid,rls,ant,dtc/dya)

**ALIRAN DANA
KASUS SYHARUL
YASIN LIMPO**

Pembelian Durian
RP 20-46 juta/pengiriman

Pembelian Mikrofon
RP 25 juta

Pembayaran Tiket Perjalanan Keluarga SYL
RP 36 juta

Pembayaran Kekurangan Dana Umrah
RP 156 juta

Pemberian Bantuan Kepada Kiai di Karawang
RP 102 juta

Servis Mobil Mercedes SYL
RP 19 juta

Pembayaran Perjalanan ke Belgia
RP 773 juta

Pembayaran gaji penyanyi dangdut Nayunda Nabila selama menjadi honorer di kementan sekitar 1 tahun
RP 4.3 juta/bulan

Biaya Umrah
RP 1 miliar

Pembelian Sound System oleh Anak SYL
RP 21 Juta

Dana Keperluan Cucu SYL
RP 20 Juta

Renovasi Kamar Anak SYL
RP 200 Juta

Perjalanan SYL dan keluarga ke Brazil
RP 600 Juta

Perjalanan SYL dan keluarga ke AS
RP 200 Juta

Pembayaran gaji pembantu SYL
RP 35 Juta

Pembelian Lukisan Sujiwo Tejo
RP 200 Juta

Pembelian Keris Emas
RP 105 Juta

Pembelian Sapi Kurban
RP 360 Juta

Penyediaan 13 ribu paket sembako di luar program Kementan
RP 1.95 Miliar





Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Layak Dibahas Lebih Lanjut

BANGGAR DPRD JATIM EVALUASI KINERJA BUMD



Sidang Paripurna DPRD Jatim dengan Agenda penyampaian Laporan Banggar DPRD Jatim Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Jatim, Indrapura, Surabaya pada Rabu (19/6/2024). (Pradita/LenteraToday)

SURABAYA - Berdasarkan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, dapat ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan APBD tahun anggaran 2023 dengan baik dan akuntabel.

Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim), Mohammad Nasih Aschal menyatakan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2023 layak untuk dibahas lebih lanjut oleh fraksi maupun komisi di DPRD Jatim.

Hal tersebut ia sampaikan saat Sidang Paripurna DPRD Jatim dengan Agenda penyampaian Laporan Banggar DPRD Jatim Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Jatim, Indrapura, Surabaya pada Rabu (19/6/2024).

"Berdasarkan penyampaian pendapat oleh Banggar tanggal 30 Mei 2024 lalu, bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2023 layak untuk dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi maupun komisi-komisi," ujarnya.

Meskipun layak untuk dibahas lebih lanjut, anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut tetap menyoroti

beberapa hal yang dinilai kurang dan perlu untuk diberikan evaluasi. Salah satunya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Diketahui BUMD hanya mampu merealisasikan Rp 459,794 miliar dari target Rp 471,791 miliar. Artinya realisasi hanya mencapai 97,46 persen dari target sepanjang tahun 2023.

"Penerimaan pajak daerah dan retribusi pertumbuhannya masih dibawah 4 persen. Selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya tidak mencapai target dari penyerahan hasil laba BUMD," tuturnya.

Lebih lanjut, politisi dari Partai Nasdem tersebut menyinggung perihal belanja daerah yang ia nilai perencanaan terhadap rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum matang. Sehingga, indikator kinerja pembangunan banyak catatan masalah.

"Sisa anggaran belanja OPD seperti di Bapenda, PU, PRKP, Cipta Karya, dan OPD lainnya hendaknya Pemprov lakukan rasionalisasi untuk selanjutnya dilakukan realokasi terhadap sektor strategis," jelasnya.

Perihal pembiayaan daerah yang turut menjadi pokok bahasan Banggar DPRD Jatim, legislator dari Dapil Jawa Timur 14 (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) tersebut mensyukuri aspek Pembiayaan Netto Provinsi Jatim yang berada pada posisi lebih dari cukup.

Menurut dia, baiknya posisi Pembiayaan Netto Jatim pada Tahun Anggaran 2023 tersebut membuat defisit anggaran Jatim tertutupi, meskipun begitu dirinya menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang berjumlah Rp 3,797 triliun atau 10 persen dari dana tersedia.

"Saya mewakili Banggar mendorong Pemprov untuk secepatnya memastikan realisasi SILPA Tahun

2023 yang telah ditentukan penggunaannya dalam APBD 2024 dan memfokuskan SILPA 2023 untuk sektor pelayanan publik daerah," katanya.

Di akhir, Nasih Aschal mengungkapkan beberapa agenda kebijakan yang harus ditekankan sepanjang tahun 2024. "Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tiap tahun mencatat temuan kelemahan pengelolaan aset daerah, kami minta kedepannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersinergi dengan OPD lain untuk melakukan optimalisasi pengelolaan aset," ungkapnya.

Selain itu, melihat realisasi investasi di Jatim yang mencapai Rp 145,1 triliun atau tumbuh 31,5 persen di tahun 2023, Banggar berharap kedepannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menguatkan fokus investasi di sektor pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan UMKM.

"Banggar juga meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk secara serius menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dengan melakukan koreksi terhadap semua rekomendasi dan catatan BPK dengan berkoordinasi bersama komisi terkait di DPRD Jatim," tutupnya. (Adv,Pradita/Dya)

